

# GUNTINGAN BERITA

DE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	REPUBLIKA	15	23-08-2002

## Tabrani Bongkar Kedok 'Provinsi Kepri'

Disinyalir, keinginan bupati menjadikan Kabupaten Kepri menjadi provinsi terkait potensi penggalian pasir laut di daerah yang berdekatan dengan Singapura.

JAKARTA — Isu KKN dan suap yang menyeliputi pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) semakin dibuka lebar. Ketua Ad Hoc Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Prof Dr Tabrani Rab, Rabu (21/8), mendatangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan BPK mengenai penyelewengan dana APBD sebesar Rp 87,2 miliar dengan pelaku Bupati Kepri Huzrin Hood.

Kepada pers kemarin, Tabrani mengatakan dalam pertemuan dengan Kasubdit Tindak Pidana Khusus Djoko Santoso di Kejaksaan ternyata masalah penyelewengan tersebut sudah di tangan Kejaksaan. "Kejaksaan Agung telah memberikan instruksi kepada Kejati Riau untuk memben-

tuk tim khusus guna menangani kasus itu. Bahkan Kejati Riau sudah membuat surat perintah operasi intelijen yustisial yang dikeluarkan pada 21 Agustus 2002," katanya.

Untuk itu, Tabrani mendesak kepada Mendagri untuk segera menonaktifkan Bupati Kepri Huzrin Hood. "Sesuai peraturan pemerintah No 108 yang isinya menyatakan setiap bupati yang bermasalah bisa dinonaktifkan selama masa penyelidikan. Hal ini sangat penting dilakukan supaya tersangka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghilangan bukti serta melakukan penekanan kepada pihak-pihak terkait dan melarikan diri," ujarnya.

Menurut Tabrani, tidak tertutup kemungkinan dana tersebut juga mengalir ke Pansus Pembentukan Provinsi Kepri DPR RI, Mahkamah Agung, dan Departemen Dalam Negeri, guna memuluskan Kepri menjadi provinsi. "Banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada selama ini, seperti pembentukan pansus Kepri yang sama sekali tidak mengindahkan Gubernur Riau dan DPRD TK I. Selain itu masalah fatwa MA, serta putusan PTUN, banyak ke-

janggalan," katanya.

Tabrani berharap dari penyelidikan dan penyidikan Kejaksaan bisa terbongkar kemana aliran dana tersebut dikucurkan. Tokoh masyarakat Riau itu mensinyalir, keinginan Huzrin Hood untuk menjadikan Kabupaten Kepri menjadi provinsi, terkait potensi penggalian pasir laut di daerah yang berdekatan dengan Singapura itu.

Pasalnya, untuk menggali pasir dalam radius 4-12 mil laut, harus mendapat izin gubernur. "Izin penggalian pasir 0-4 mil itu harus mendapatkan izin bupati. Kalau 4-12 mil harus izin gubernur. Sedangkan 12 mil ke atas harus izin ke pemerintah pusat. Nah yang paling banyak pasirnya itu 4-12 mil. Kalau 0-4 mil jika dieksploitasi akan berhadapan dengan nelayan," paparnya.

Karena itu, lanjut Tabrani, Huzrin sangat berkeinginan untuk menjadikan Kabupaten Kepri menjadi provinsi karena ingin mengambil keuntungan dari penambahan pasir laut tersebut. "Bahkan saya menduga Singapura berada di belakang Huzrin Hood karena Singapura sebagai importir pasir terbesar dari Kepri," katanya.

Ide pembentukan Propinsi Riau ini pada hakikatnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Dalam Pasal 16 ayat (1)

butir c PP No.129/2000 diatur salah satu prosedur pembentukan daerah adalah melalui usulan yang disampaikan kepada pemerintah cq. Mendagri dengan dilampirkan hasil penelitian daerah dan persetujuan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi dimaksud, yang dituangkan dalam keputusan DPRD.

Hingga kini, keputusan DPRD yang diwajibkan oleh PP No.129/2000 untuk pembentukan Propinsi Kepri tersebut tidak pernah diterbitkan. Pasalnya, pihak DPRD Riau memang tidak menyetujuinya. Sehingga cukup mengherankan ketika DPR bisa menerima dan membahas RUU Kepri tersebut di awal.

Masalah penyuapan sejumlah pejabat ini ternyata tidak hanya di pusat saja. Sebelumnya beberapa orang oknum anggota DPRD Provinsi Riau diduga menerima suap sebesar Rp 50 juta per orang dari pihak tertentu yang ingin agar perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) direstui dewan.

Ketua DPRD Riau drh Chaidir, MM, Selasa (20/8), mengakui adanya upaya pihak-pihak tertentu melakukan penyuapan terhadap beberapa anggota dewan agar menyetujui terbentuknya Propinsi Kepri, dan bahkan ia sudah melaporkan kasus ini kepada Mendagri Hari Sabarno.

Dikabarkan uang pelicin itu diserahkan melalui seorang oknum anggota badan strategis tingkat pusat.

■ one